PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT PARU MANGUHARJO PROVINSI JAWA TIMUR
Jalan Yos Sudarso Nomor 108-112, Madiun Lor, Manguharjo, Madiun, Jawa Timur 63122
Telepon (0351) 464916, Laman rspmanguharjo.jatimprov.go.id

Madiun, 22 Januari 2026

Nomor : 400.7.3.6/290/102.14/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Lembar
hal : Laporan Kinerja Tahun 2025

Yth. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
di
S U R A B A Y A

Menindaklanjuti surat pemberitahuan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor: 400.7/1019/102.1/2025 tanggal 29 Desember 2025 Perihal Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 maka kami sampaikan Laporan Kinerja Tahun 2025 di Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur. Adapun untuk laporan kami lampirkan dalam surat ini.

Demikian,atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terimakasih.

Direktur Rumah Sakit Paru Manguharjo

dr. Hendri Harianto, M.Kes
Pembina/IV.a
NIP 197012092007011012

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025



RUMAH SAKIT PARU MANGUHARJO PROVINSI JAWA TIMUR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

085794338442 (0352) 462427 bit.ly/layananRSPM RS Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur

LAPORAN KINERJA
RUMAH SAKIT PARU MANGUHARJO PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2025

I. PENDAHULUAN

A. Struktur Organisasi

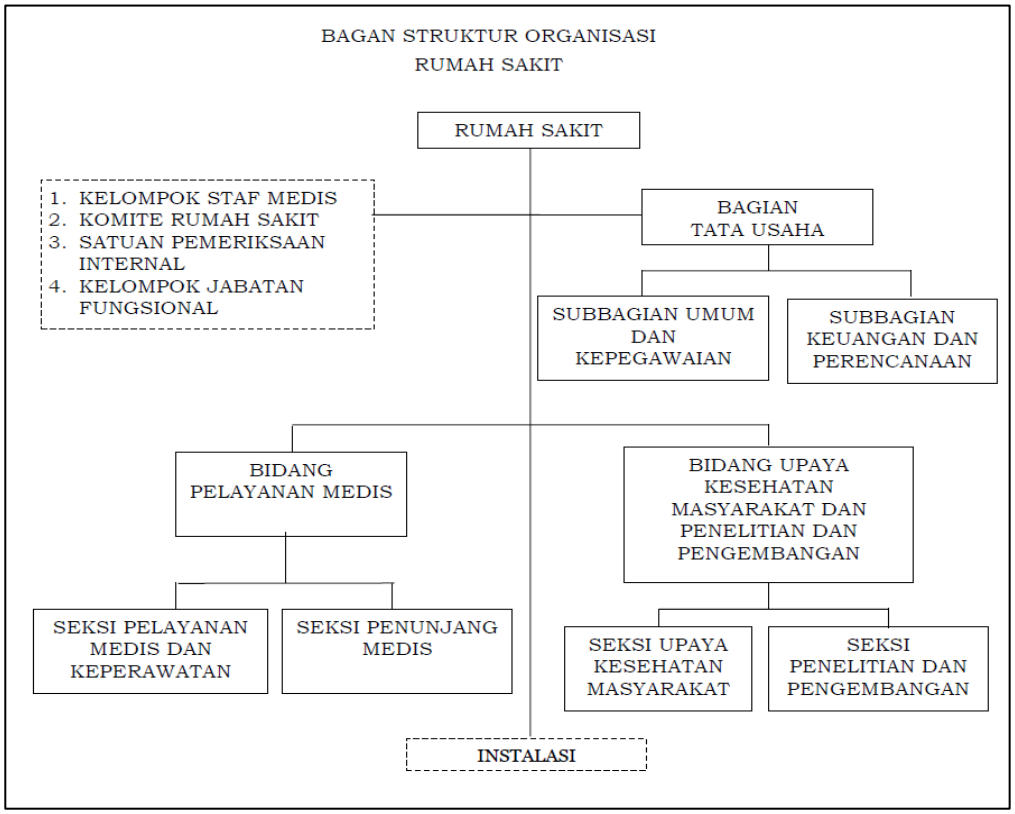

B. Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur "Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur di bidang penyakit paru dan pernafasan secara paripurna yang meliputi promotiv, preventif, kuratif dan rehabilitatif beserta sistem rujukannya, pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan serta kemitraan di bidang kesehatan paru dan pernafasan serta pelayanan kesehatan lain bagi masyarakat"

2.1.1 Fungsi Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur :

a. Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian operasional program pemerintah berkaitan dengan kesehatan paru yang ditugaskan kepada Rumah Sakit terutama program pemberantasan penyakit tuberkulosis (P2TB) serta kolaborasinya;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Pelaksanaan pelayanan kesehatan paru yang meliputi promotif,preventif,kuratif dan rehabilitatif baik upaya kesehatan perorangan (UKP) maupun upaya kesehatan masyarakat (UKM) di dalam gedung maupun di luar gedung di wilayah kerjanya meliputi kabupaten/kota seluruh Jawa Timur;
c. Pelaksanaan pelayanan rawat jalan, rawat inap,pelayanan bedah sentral dan gawat darurat dengan berorientasi pada pelayanan komunitas;
d. Pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan non medis di bidang kesehatan paru dan pelayanan kesehatan lainnya ;
e. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna di bidang kesehatan paru dan pelayanan kesehatan lainnya;
f. Pelaksanaan kemitraan, sosialisasi , advokasi ,pembinaan, bimbingan teknis dalam program pengendalian tuberculosis serta penyakit paru dan lainnya;
g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan termasuk pengelolaan keuangan,kerumahtanggaan dan kehumasan baik secara mandiri maupun dibawah koordinasi Dinas;
h. Pelaksanaan pelayanan kesehatan umum masyarakat;Usaha, 1 (satu) Kepala Seksi Pelayanan Medis, dan 1 (satu) Kepala Seksi UKM dan Litbang.
i. Pelayanan rujukan baik pasien specimen, ilmu pengetahuan dan teknologi maupun program kesehatan masyarakat;dan
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta tata kerja Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur Adapun Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur Direktur dan eselon dibawahnya adalah sebagai berikut :

2.1.1. Kepala Rumah Sakit

2.1.1.1 Kepala mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian, yang pertanggungjawabannya dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.1.1.2 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Rumah Sakit mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian operasional program pemerintah berkaitan dengan kesehatan paru yang ditugaskan kepada Rumah Sakit terutama program pemberantasan penyakit tuberkulosis (P2TB) serta kolaborasinya;
b. Pelaksanaan pelayanan kesehatan paru yang meliputi promotif,preventif,kuratif dan rehabilitatif baik upaya kesehatan perorangan (UKP) maupun upaya kesehatan masyarakat (UKM) di dalam gedung maupun di luar gedung di wilayah kerjanya meliputi kabupaten/kota seluruh Jawa Timur;
c. Pelaksanaan pelayanan rawat jalan, rawat inap,pelayanan bedah sentral dan gawat darurat dengan berorientasi pada pelayanan komunitas;
d. Pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan non medis di bidang kesehatan paru dan pelayanan kesehatan lainnya ;
e. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna di bidang kesehatan paru dan pelayanan kesehatan lainnya;
f. Pelaksanaan kemitraan, sosialisasi , advokasi ,pembinaan, bimbingan teknis dalam program pengendalian *tuberculosis* serta penyakit paru dan lainnya;
g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan termasuk pengelolaan keuangan,kerumahtanggaan dan kehumasan baik secara mandiri maupun dibawah koordinasi Dinas;
h. Pelaksanaan pelayanan kesehatan umum masyarakat;
i. Pelayanan rujukan baik pasien specimen, ilmu pengetahuan dan teknologi maupun program kesehatan masyarakat;dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

2.1.2. Bagian Tata Usaha

Tugas Kepala Bagian Tata Usaha adalah tugas melaksanakan dan mengoordinasikan perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana, kehumasan, termasuk pengelolaan keuangan, aset, pengelolaan jaminan kesehatan, perencanaan dan evaluasi progam anggaran baik secara mandiri maupun dibawah koordinasi Dinas.

Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

1. penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pengelolaan kegiatan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
2. penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pengelolaan kegiatan hubungan masyarakat, protokoler, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan pengaduan masyarakat;
3. penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pengelolaan kegiatan tata kelola organisasi, perundang-undangan dan perizinan;
4. penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pengelolaan kegiatan urusan rumah tangga, pemeliharaan barang dan perlengkapan kantor;
5. penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pengelolaan kegiatan pelayanan penunjang yang meliputi pengelolaan Instalasi sarana dan prasarana, gudang medis dan non medis, kesehatan lingkungan, pengelolaan limbah medis dan non medis, ambulan, pemeliharaan jaringan yang meliputi listrik, telepon, gas medis, internet dan air bersih;
6. penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pengelolaan kegiatan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pengelolaan kegiatan penatausahaan pengeloaan keuangan, akutansi, aset, jaminan kesehatan dan pelaporannya;
8. penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pengelolaan progam kegiatan anggaran dan pelaporan;
9. dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

2.1.2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis umum dan kepegawaian;
b. melaksanakan kegiatan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
c. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat, protokoler, PPID dan pengaduan masyarakat;
d. melaksanakan kegiatan tata kelola organisasi, perundang-undangan dan perizinan;
e. melaksanakan kegiatan urusan rumah tangga, ketertiban kenyamanan dan keamanan kantor, tata laksana petugas pengemudi dan transportasi serta pemeliharaan barang dan perlengkapan kantor;
f. melaksanakan kegiatan pelayanan penunjang yang meliputi pengelolaan instalasi sarana dan prasarana, bangunan dan gedung, gudang medis dan non medis, Kesehatan lingkungan, pengelolaan limbah medis dan non medis, ambulan, pemeliharaan jaringan yang meliputi listrik, internet, telepon, gas medis dan air bersih
g. melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan umum dan kepegawaian; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.1.2.2 Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan

Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai fungsi:

a. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan dan verifikasi;
b. menyiapkan bahan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU), Langsung (LS) sebelum diproses untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
c. melaksanakan penelitian dan/atau pemeriksaan realisasi anggaran dan verifikasi surat pertanggungjawaban;
d. melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan verifikasi dan pembukuan keuangan;
e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai laporan aset barang milik daerah lingkup Rumah Sakit secara periodik;
f. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Eguitas (LPE), Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK);
g. menyiapkan Dokumen Penunjang untuk pencairan gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan pegawai setiap bulannya;
h. melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan Rumah Sakit;
i. menyusun laporan pertanggung jawaban penerimaan Rumah Sakit;
j. monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan;
k. melaksanakan pencatatan semua transaksi penerimaan dan pengeluaran anggaran Rumah Sakit;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

l. melaksanakan, mengoordinasi dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan jaminan kesehatan serta pelaporannya;
m. menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi rencana strategis bisnis dan rencana bisnis anggaran secara periodik;
n. mengoordinasikan penyusunan perencanaan program dan pemenuhan kebutuhan usulan seluruh unit pelayanan dan unit kerja;
o. mengoordinasikan penyusunan evaluasi dan laporan kinerja;
p. mempersiapkan, mengoordinasikan monitoring dan evaluasi kegiatan program dan anggaran;
q. menyiapkan bahan evaluasi laporan sistem akuntabilitas kinerja Rumah Sakit; dan
r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

2.1.3. Bidang Pelayanan Medis

Tugas Kepala Bidang Pelayanan Medis mempersiapkan perumusan kebijakan teknis medik dan melaksanakan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan, kegiatan penunjang medik serta pelayanan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan di masyarakat.

Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pelayanan Medis mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis pelayanan medik, keperawatan dan penunjang;
b. pengelolaan kegiatan pelayanan medik yang meliputi pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, pelayanan kamar operasi serta pelayanan lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan di masyarakat;
c. pengelolaan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan/atau asuhan kebidanan dalam pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, rawat intensif,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pelayanan kamar operasi serta pelayanan keperawatan lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan di masyarakat;

d. pengelolaan kegiatan pelayanan penunjang yang meliputi penunjang medik dan penunjang klinis yang terdiri dari farmasi, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medis, rekam medis, Central Sterile Supply Department (CSSD), dan laundry, gizi dan jasa boga, pemulasaraan jenazah serta pelayanan penunjang lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan di masyarakat;
e. pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan medis, keperawatan dan penunjang;
f. pelaksanaan serta pengoordinasian kegiatan peningkatan mutu pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan penunjang;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan medik, keperawatan dan penunjang; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh direktur.

2.1.3.1. Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan

Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai fungsi:

a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan medik dan keperawatan;
b. Mengelola kegiatan pelayanan medis yang meliputi pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, pelayanan kamar operasi serta pelayanan lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan di masyarakat;
c. Mengelola kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan/atau asuhan kebidanan pada pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, pelayanan kamar operasi serta pelayanan keperawatan lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan di masyarakat;
d. Melaksanakan serta mengoordinasikan kegiatan peningkatan mutu pelayanan medik dan pelayanan keperawatan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

e. Mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan medik dan keperawatan;
f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2.1.3.2. Seksi Penunjang Medik

Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medik mempunyai fungsi :

a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis penunjang medik;
b. mengelola kegiatan pelayanan penunjang yang meliputi penunjang medik dan penunjang klinis yang terdiri dari farmasi, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medis, rekam medis, CSSD dan laundry, gizi dan jasa boga, pemulasaraan jenazah serta pelayanan penunjang lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan di masyarakat;
c. mengelola data dan informasi yang berkaitan penunjang medik dan penunjang klinik;
d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penunjang medik; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2.1.4. Bidang Upaya Kesehatan Masyrakat dan Penelitian Pengembangan

Tugas Kepala Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat dan penelitian pengembangan mempunyai tugas mempersiapkan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan dalam bidang upaya kesehatan masyarakat, promosi kesehatan, survey kepuasan pelanggan, kerja sama, sistem informasi Rumah Sakit, penelitian dan pengembangan Rumah Sakit.

Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat dan Penelitian Pengembangan mempunyai fungsi :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a. Perumusan kebijakan teknis upaya kesehatan masyarakat dan penelitian dan pengembangan;
b. Pengelolaan kegiatan dan pengembangan program kesehatan paru dan pernafasan serta progam kesehatan lainnya;
c. Pengelolaan kegiatan koordinasi dan fasilitasi upaya kesehatan masyarakat di wilayah binaan;
d. Pengelolaan kegiatan survey kepuasan masyarakat;
e. Pengelolaan program promosi kesehatan rumah sakit;
f. Pengelolaan penyuluhan kesehatan masyarakat;
g. Pengelolaan kegiatan surveilans kesehatan masyarakat;
h. Pengelolaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan program pelayanan kesehatan;
i. Pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan sistem informasi manajemen rumah sakit;
j. Pengelolaan kegiatan penyusunan dan analisa program kerja sama di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pelayanan kesehatan termasuk sarana dan sumber daya manusia;
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan upaya kesehatan masyarakat dan penelitian dan pengembangan; dan
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

2.1.4.1 Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat

Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis upaya kesehatan masyarakat;
b. Mengelola kegiatan dan pengembangan program kesehatan paru dan pernafasan serta progam kesehatan lainnya;
c. Mengelola kegiatan koordinasi dan fasilitasi upaya kesehatan masyarakat di wilayah binaan;
d. Mengelola kegiatan survey kepuasan masyarakat;
e. Mengelola program promosi kesehatan rumah sakit;
f. Mengelola kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat;
g. Mengelola kegiatan surveilans kesehatan masyarakat;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan upaya masyarakat; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

2.1.4.2 Seksi Penelitian dan Pengembangan

Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan;
b. mengelola kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan program pelayanan kesehatan;
c. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan sistem informasi manajemen Rumah Sakit
d. mengelola kegiatan program kerja sama di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pelayanan kesehatan termasuk sarana dan sumber daya manusia;
e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian dan pengembangan; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

C. ISU STRATEGIS

Isu strategis dalam pengembangan Rencana Strategis (Renstra) Rumah SakitParu Manguharjo Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

1. Penanganan bahwa RS Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga memungkinkan memiliki jejaring yang kuat.

   Dalam penanganan meningkatkan jejaring upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan fleksibilitas kerjasama dengan mitra RS yang sesuai dengan pedoman dan panduan yang sudah ditetapkan, serta melakukan pendekatan dengan door to door ke instusi terkait sehingga bisa memperkuat jejaring.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. RS Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur selalu meningkatkan mutu pelayanan terbukti dengan legalitasnya dimana sudah mendapat predikat terakreditasi paripurna.

   Kebutuhan untuk meningkatkan mutu pelayanan harus dipantau melalui pengawasan mutu pelayanan yang efektif secara rutin dan terkoordinasi dengan dibuktikan sudah terakreditasinya paripurna maka bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada RS Paru Manguharjo Provinis Jawa timur. Perhatian khusus juga perlu diperhatikan bahwa keberadaan RS Paru Manguharjo Provinis Jawa Timur harus memperhatikan kebutuhan masyarakat akan terpenuhinya layanan kesehatan oleh sebab itu maka perlu melakukan pengembangan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

3. Prevalensi Tb yang masih tinggi

   Berdasarkan data hasil survei WHO dimana Pemerintah Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat ke 3 di Indonesia untuk itu upaya yang dilakukan dengan menurunkan prevalensi TB di tahun 2025 dengan intervensi lebih spesifik salah satunya deteksi dini dengan pemeriksaan di setiap rumah dan dilakukan pemantauan terhadap penggunaan obat.

4. Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, baik dalam jumlah maupun jenis tenaga

   Kebutuhan dokter di RS Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur jika sesuai dengan Tugas dan Fungsi nya dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur No 18 Tahun 2022 tentang Nomenklatur dan tata Kelola Rumah sakit di mana sebagai RS Khusus Paru Type B masih membutuhkan tenaga medis untuk Dr Spesialis Bedah Thorax, Spesialis anestesi, spesialis bedah umum, spesialis anak sehingga perlu menjadi perhatian untuk mendukung arah tarnsformasi pelayanan kesehatan yang berfokus pada kebutuhan masyarakat.

   Arah Transformasi pelayanan kesehatan rujukan adalah peningkatan akses dan mutu pelayanan. Pemenuhan dokter spesialis merupakan salah satu aspek untuk meningkatkan akses

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

masyarakat pada pelayanan kesehatan rujukan termasuk pelaksanaan rujukan berbasis kompetensi.

5. Bertambahnya jumlah fasilitas kesehatan dan kemudahan akses layanan kesehatan perlu diimbangi dengan mutu pelayanan kesehatan

Rumah Sakit berkewajiban melakukan peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara internal dan eksternal secara terus menerus dan berkesinambungan. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara internal dan eksternal melalui pengukuran dan pelaporan indikator mutu, pelaporan insiden keselamatan pasien dan manajemen resiko.

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara eksternal dilakukan melalui registrasi,lisensi dan akreditasi. Pelaksanaan registrasi,lisensi dan akreditasi dilaksanakan dengan berorientasi pada pemenuhan standar mutu, pembinaan dan peningkatan kualitas layanan, serta proses yang cepat,terbuka dan akuntabel. Pelayanan yang berkualitas dan bermutu merupakan suatu keharusan dan mutu dipenuhi oleh seluruh Rumah Sakit. Suatu pelayanan kesehatan dapat dikatakan bermutu yang berdampak pada kepuasan pasien artinya pemberi layanan mampu memenuhi kebutuhan dan kenyamanan konsumennya.

Pada kenyataan nya, kondisi sekarang ini Rumah Sakit Paru Manguharjo berfokus pada kendali biaya daripada kendali mutu, kurangnya penerapan budaya mutu dan keselamatan pasien dan kurangnya pemenuhan mutu pelayanan rumah sakit baik pemenuhan mutu internal maupun eksternal. Rendahnya mutu pelayanan dapat disebabkan oleh factor input (kurangnya fasilitas, peralatan,tenaga dokter ahli, dana dan sebagainya) Beberapa factor yang mendukung mutu pelayanan yang rendah di RS diantaranya jumlah tenaga medis, kuantitas dan kualitas SDM kesehatan, serta alokasi pendanaan masih memprioritaskan pada fisik peralatan.

Angka insiden terjadinya keselamatan pasien seperti fenomena gunung es, angka kejadian yang terlihat hanya sebagian kecil dari kejadian sebenarnya di Rumah Sakit. Kesalahan medis

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

yang dapat dicegah atau perawatan pasien yang tidak aman masih merupakan masalah dalam dunia kesehatan secara global sampai saat ini. Presentasi terjadinya kejadian yang mengancam keselamatan pasien seharusnya sebesar 0%. Berdasarkan penjelasan sebelumnya tingginya prevalensi insiden keselamatan pasien menjadi hal yang mendasar pentingnya upaya-upaya keselamatan pasien di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya di Rumah Sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan.

6. Sistem rujukan pelayanan kesehatan masih belum optimal yang dilihat dari masih banyaknya antrian pasien di fasilitas pelayanan kesehatan.

   Sistem rujukan mengalami perkembangan dari masa ke masa menyesuaikan dengan perkembangan kondisi, pada tahun 2015 sistem rujukan yang dibangun adalah dengan rujukan regional yang penataannya lebih mengutamakan terkait dengan letak geografisnya. Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol membuat sistem rujukan regional sesuai letak geografis sudah tidak relevan lagi sehingga perlu dikembangkan sebuah sistem rujukan yang tidak hanya melihat kondisi geografis tetapi lebih menitikberatkan pada layanan unggulan yang disediakan oleh masing-masing rumah sakit. Regionalisasi rujukan harus dikembangkan berdasarkan kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna.

   Sistem rujukan terintegrasi yang ada saat ini belum bisa berjalan optimal dikarenakan dibutuhkan komitmen dari pihak internal dan eksternal rumah sakit.Tantangan yang lain adalah bahwa sistem rujukan terintegrasi bekum sejalan dengan sistem pembiayaannya. Kondisi yang ada saat ini adalah belum menjadi satu kesatuan antara sistem rujukan online dengan sistem rujukan terintegrasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

D. CASCADING

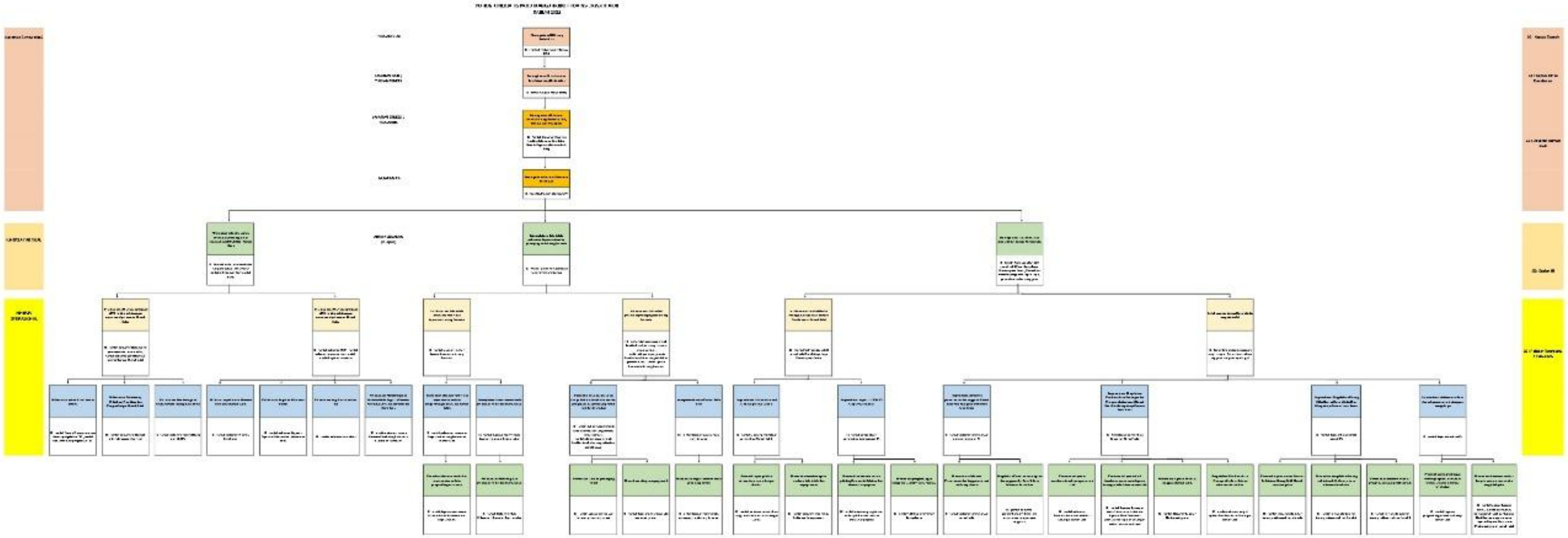

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

D.1. Cascading Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2030, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kesehatan melaksanakan berbagai program dan kegiatan di bidang kesehatan, salah satunya melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan oleh Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur.

Pada level makro, RPJMD Provinsi Jawa Timur menetapkan tujuan pembangunan daerah berupa meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Pencapaian tujuan tersebut diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang salah satu komponennya adalah aspek kesehatan. Oleh karena itu, sektor kesehatan memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang secara langsung berdampak pada peningkatan IPM Provinsi Jawa Timur.

Selaras dengan tujuan tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menetapkan sasaran meningkatnya akses layanan kesehatan yang berkualitas, dengan indikator kinerja berupa Umur Harapan Hidup (UHH). Sasaran ini menjadi outcome sektoral yang menjembatani tujuan pembangunan daerah dengan kinerja perangkat daerah, termasuk rumah sakit milik pemerintah provinsi sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan rujukan.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan, RS Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur menurunkan sasaran tersebut ke dalam sasaran organisasi, yaitu meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu, adil, merata, dan terjangkau. Pencapaian sasaran ini diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) serta nilai hasil survei akreditasi rumah sakit. Indikator tersebut mencerminkan kualitas layanan yang diterima masyarakat sekaligus tingkat kepatuhan rumah sakit terhadap standar pelayanan dan keselamatan pasien.

Selanjutnya, sasaran organisasi RS Paru Manguharjo dijabarkan ke dalam kinerja taktis pada level manajerial, yang diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan serta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

penguatan tata kelola rumah sakit. Hal ini diwujudkan melalui pemenuhan elemen akreditasi rumah sakit, peningkatan profesionalitas aparatur, peningkatan cakupan layanan kesehatan, serta pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel. Kinerja pada level ini berperan penting dalam memastikan bahwa pelayanan yang diberikan tidak hanya berkualitas, tetapi juga berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip good governance.

Pada tingkat operasional, pelaksanaan kinerja difokuskan pada penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medik, serta penguatan sistem manajemen rumah sakit. Kegiatan operasional tersebut meliputi pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar, penerapan budaya mutu, pelaksanaan surveilans dan promosi kesehatan rumah sakit, serta penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. Output dari kegiatan operasional ini menjadi fondasi utama dalam mendukung pencapaian sasaran taktis dan sasaran strategis rumah sakit.

Seluruh rangkaian cascading kinerja tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang logis dan terukur antara aktivitas pada level pelaksana dengan capaian kinerja pada level organisasi, sektor kesehatan, hingga tujuan pembangunan daerah. Dengan demikian, kinerja RS Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur secara nyata berkontribusi terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, yang pada akhirnya mendukung pencapaian sasaran RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2030

E. TINDAK LANJUT REKOMENDASI KINERJA TAHUN 2024

Dari uraian hasil evaluasi dan analisis kinerja Direktur Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur tahun 2024 seperti tersebut diatas, maka rencana tindak lanjutnya antara lain:

1. Pemantapan organisasi dan manajemen serta pengembangan sumber daya manusia dilakukan secara terus menerus agar mutu pelayanan dapat dipertahankan dan ditingkatkan sesuai standar yang telah ditetapkan.
2. Promosi kesehatan dilakukan secara efektif agar cakupan pelayanan rumah sakit meningkat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Budaya kerja sesuai standar prosedur operasional perlu ditingkatkan dalam rangka mempertahankan konsistensi akreditasi rumah sakit.
4. Pemenuhan Sarana Prasarana sehingga dapat menunjang pemberian pelayanan kesehatan
5. Penambahan jejaring pembiayaan di RS Paru Manguharjo untuk meningkatkan Pendapatan di karenakan ada perubahan secara dinamis tentang regulasi BPJS Kesehatan tentang mapping wilayah sistem rujukan
6. Pemenuhan kebutuhan belanja yang belum terealisasi di Tahun 2024 menjadi skala prioritas pelaksanaan
7. Peningkatan target indikator kinerja di Tahun 2025 untuk indikator yang sudah tercapai

II. PERENCANAAN KINERJA

A. RINGKASAN RENSTRA TAHUN 2025

Ringkasan target dan fokus strategis Rumah Sakit Paru Manguharjo untuk periode 2025–2026:

1. Sasaran Startegis dan Target Kinerja

   Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur menetapkan dua sasaran utama dengan kinerja sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Target 2026
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	83.92%	83.92%
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Mutu Layanan dan Keselamatan Pasien	Nilai Survei Akreditasi Rumah Sakit	92%	93%

1.1. Tujuan

utama rumah sakit adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan spesialis paru yang berkualitas dan terjangkau. Tujuan ini merupakan integrasi dari misi rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan paru yang paripurna (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.2. Sasaran Strategis dan Indikator Target

Sasaran utama difokuskan pada penguatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Berikut adalah rincian sasaran disertai target indikator kinerjanya

Tabel A.1.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja & Target (Akhir 2029)
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Paru yang Bermutu & Berstandar	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Paru yang Paripurna dan Terjangkau	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): 89.00Indeks Keselamatan Pasien: 100%Persentase Keluhan yang Tertangani: 100%
Meningkatkan Tata Kelola Rumah Sakit yang Akuntabel & Mandiri	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP: AAOpini Laporan Keuangan: WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Kesehatan	Terwujudnya SDM yang Profesional dan Adaptif	Persentase SDM Memenuhi Kompetensi: 100%

B. RINGKASAN RENJA TAHUN 2025

Berdasarkan dokumen Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur, berikut adalah ringkasan capaian kinerja dan target untuk periode 2025–2026:

1. Ringkasan Anggaran dan Program Utama

   Secara keseluruhan, RS Paru Manguharjo mengelola dua program utama dengan total pagu indikatif (untuk tahun 2027 sebagai referensi perbandingan) sebesar Rp17.667.575.950.

   a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan: Fokus pada tata kelola pelayanan kesehatan yang akuntabel.

   b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan: Fokus pada kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat.

2. Target dan Realisasi Kinerja (2025–2026)

No	Indkator Kinerja	Realisasi 2025	Target 2026
1	Persentase Realisasi Anggaran	92%	90%
2	Elemen Akreditasi sesuai Standar	96,70%	92%
3	Persentase Indikator Program Tercapai	98%	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4	Layanan Kesehatan Prioritas yang Dikembangkan	80%	80%

Catatan: Data menunjukkan adanya sedikit penyesuaian target pada tahun 2026 dibandingkan realisasi 2025, khususnya pada elemen akreditasi dan realisasi anggaran.

3. Fokus Kegiatan dan Pemanfaatan Dana

   Kegiatan operasional dan pengembangan dibagi menjadi beberapa sub-kegiatan utama:

   a. Peningkatan Pelayanan BLUD: Didanai melalui Pendapatan BLUD dengan fokus pada penyediaan pelayanan dan penunjang di 19 unit kerja.
   b. Sarana dan Prasarana (UKP/UKM):
      - Rehabilitasi & Pemeliharaan: Meliputi fasilitas kesehatan lainnya dan gedung rumah sakit.
      - Pengadaan Alat Kesehatan: Penyediaan serta kalibrasi alat medis untuk menjaga standar pelayanan.
      - Operasional Medis: Pengadaan obat, vaksin, serta bahan medis habis pakai (BMHP).
   c. Promosi & Informasi Kesehatan:
      - Pengelolaan surveilans kesehatan (target 5 dokumen di 2027).
      - Pengembangan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi (target 1 dokumen).

4. Prioritas Daerah dan Nasional

   Seluruh kegiatan ini diarahkan untuk mendukung prioritas "JATIM SEHAT". Tujuannya adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses, dan berkeadilan, dengan lokasi fokus di Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

1. Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur Tahun 2025

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERSPEKTIF
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Rumah Sakit	83.92	Penguatan Internal dan Anggaran
Meningkatnya akses mutu pelayanan Rumah Sakit dan Keselamatan Pasien	Nilai Survei Akreditasi Rumah Sakit	92	Proses Bisnis

Sumber: Bagian Perencanaan dan Evaluasi RS Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur

1. Kesesuaian Tujuan dan Sasaran Strategis

   Berdasarkan dokumen perjanjian kinerja tahun 2025 pada Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur menetapkan dua sasaran strategis utama yaitu:

   a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja rumah sakit
   b. Meningkatnya Akses Mutu Pelayanan Rumah Sakit dan Keselamatan Pasien

   Pada kedua sasaran tersebut telah mencerminkan fungsi utama Rumah Sakit sebagai organisasi pelayanan pyblik, sekaligus mendukung agenda reformasi birokrasi dan peningkatan mutu layanan Kesehatan. Sasaran ini juga selaras dengan arahan dan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dibidang pelayanan Kesehatan dan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel.

2. Analisis Indikator Kinerja dan Target

   a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja rumah sakit

      Pada sasaran ini di ukur melalui indikator Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur dengan target 83.92 pada perspektif Penguatan Internal dan Anggaran

   b. Meningkatnya Akses Mutu Pelayanan Rumah Sakit dan Keselamatan Pasien

      Pada sasaran ini diukur dengan Nilai Survei Akreditasi Rumah Sakit dengan Target 92 pada Persepektif Porses Bisnis. Indikator ini sangat relevan diakrekan

      - Akreditasi merupakaan standar mutu utama pelayanan publik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Nilai survey akreditasi mencerminkan kepatuhan terhadap standar pelayanan, keselamatan pasien dan tata Kelola klinis

2. Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Perubahan)

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERSPEKTIF
Meningkatnya akses mutu pelayanan Rumah Sakit dan Keselamatan Pasien	Nilai Survei Akreditasi Rumah Sakit	92	Proses Bisnis

Penilaian Kinerja Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur pada tahun 2025 (perubahan) memiliki satu sasaran yaitu Meningkatnya akses mutu pelayanan Rumah Sakit dan keselamatan Pasien, dimana pada sasaran ini ditetapkan indiaktor Nilai Survey Akreditasi Rumah Sakit dengan target 92% pada target ini tidak mengalamai perubahan.

III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

A.1. Capaian Kinerja Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Akuntabiltas Kinerja Rumah Sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RS Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur	90	94.72	105.24
	Indeks profesionalitas ASN RS Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur	83	85.01	102.42
	Persentase indikator program RS Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur	90	92.85	103.16
Meningkatnya akses mutu pelayanan Rumah Sakit dan Keselamatan Pasien	Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standard	92	99.37	108.01

Sumber: Bagian Perencanaan dan Evaluasi RS Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dalam mendukung tercapainya sasaran dan indikator kinerja rumah sakit Tahun 2025, Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur memiliki 2 (dua) program yaitu:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,** yang memiliki 3 (tiga) indikator kinerja sebagai berikut:
   a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur dengan target sebesar 90
   b. Indeks profesionalitas ASN RS Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur dengan target 83
   c. Persentase indikator program RS Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur dengan target 90%

   Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terbagi menjadi 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:
   - Administrasi Keuangan Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan dengan target sebanyak 12 laporan;
   - Peningkatan Pelayanan BLUD dengan indikator Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target dengan target sebesar 95 %.

2. **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat** dengan indikator Persentase Elemen Akreditasi yang Memenuhi Standar dengan target sebesar 92, yang terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu :
   a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan indikator Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang terpenuhi dengan target sebesar 95%.

   Capaian program dan kegiatan Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

A.2. Perbandingan Capaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				Th. 2024 (n-1)	Th. 2025 (1)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabiltas Kinerja Rumah Sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RS Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur	**90**	**93.27**	**94.72**
		Indeks profesionalitas ASN RS Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur	**83**	**87.77**	**85.01**
		Persentase indikator program RS Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur	**90**	**98%**	**92.85%**
	Meningkatnya akses mutu pelayanan Rumah Sakit dan Keselamatan Pasien	Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standard	**92**	**92%**	**99.37%**

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sama dari tahun 2024 dan 2025, dimana pada indikator yang sudah ditetapkan semua mencapai target. namun terdapat beberapa faktor baik pendorong dan pengambatnya diantaranya:

1. Faktor Pendorong
   a. Kepuasan Masyarakat yang tinggi sebesar 105.24, hal ini didorong oleh:
      - peningkatan kualitas pelayanan medis dan penunjang
      - optimalisais systemm pelayanan berbasis digital
      - komitmen unit pelayanan dalam menjaga standar mutu dan keselematan pasien
   b. Kepatuhan administrasi dan Tata Kelola Keuangan didorong oleh:
      - kepatuhan terhadap regulasi keuangan dan BLUD
      - kapasitas SDM keuangan yang memadai
      - dukunan sistem informasi keuangan yang terintegrasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Capaian akreditasi yang sangat baik didoron oleh:
   - keterlibatan aktif seluruh pokja akreditasi
   - integrasi akreditasi dengan perencanaan dan evaluasi kinerja
   - dukungan manaemen dalam pemenuhan dokumen dan implementasi standar

d. Pemenuhan sarana prasarana
   - kesesuaian antara target dan realisasi kebutuhan sarana dan prasarana menunjukkan perencanaan kebutuhan yang realistis dan pengelolaan aset yang efektif.

2. Faktor Penghambat

Terdapat kegiatan dan subkegiatan dengan target 0% (nol) dikarenakan tidak mendapatkan alokasi anggaran subsidi untuk program pada sub kegiatan tersebut, tetapi secara operasional semua kegiatan yang diampu pada kegiatan dan sub kegiatan tersebut tetap terlaksana dengan menggunakan anggaran BLUD.

A.3. **Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode renstra**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA 2030	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya akses, mutu pelayanan dan tata kelola Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur	Nilai Akreditasi Rumah Sakit Paru Manguharjo Provisi Jawa Timur	92.00	99.37	112.3

Dari data tabel diatas, terdapat 1 (satu) indikator yang memiliki Tingkat kemajuan yang sudah baik. Hal -hal yang dapat dilakukan oleh organisasi untuk dapat mempertahankan nilai capaian target indikator diantaranya :

1. Peningkatan kualitas pelatihan dan pengembangan kompetensi
2. Pemanfaatan teknologi untuk mendukung kinerja ASN
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

A.4. Pembanding Realisasi Kineja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi	Realisasi Nasional
1	Meningkatnya akses, mutu pelayanan dan tata kelola Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur	Nilai Akreditasi Rumah Sakit Paru Manguharjo Provisi Jawa Timur	99.37	89

a. Capaian Kinerja Rumah Sakit Paru Manguharjo

Nilai akreditasi Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur tercatat sebesar 99,37. Nilai ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang sangat tinggi terhadap standar akreditasi rumah sakit, yang mencakup aspek tata kelola, keselamatan pasien, mutu pelayanan klinis, serta manajemen penunjang pelayanan.

b. Perbandingan dengan Realisasi Nasional

Adapun realisasi nilai akreditasi nasional berada pada angka 89. Jika dibandingkan, capaian Rumah Sakit Paru Manguharjo lebih tinggi sebesar 10,37 poin dibandingkan rata-rata nasional. Selisih ini mencerminkan kinerja institusi yang berada di atas standar nasional, baik dari sisi mutu pelayanan maupun tata kelola organisasi.

c. Interpretasi dan Implikasi Kinerja

Capaian tersebut mengindikasikan bahwa:

- Sistem manajemen mutu dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Paru Manguharjo telah berjalan lebih optimal dibandingkan rata-rata rumah sakit secara nasional.
- Upaya peningkatan mutu berkelanjutan (continuous quality improvement) telah diimplementasikan secara konsisten dan terintegrasi.
- Tata kelola rumah sakit, termasuk kepemimpinan, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap regulasi, telah mendukung pencapaian kinerja yang unggul.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Kesimpulan Analitis

Secara keseluruhan, realisasi kinerja Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur pada indikator Nilai Akreditasi telah melampaui standar nasional. Hal ini menunjukkan bahwa rumah sakit tidak hanya memenuhi kewajiban normatif, tetapi juga mampu menjadi benchmark dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan paru yang bermutu dan berdaya saing.

Analisis ini dapat digunakan sebagai dasar penguatan narasi kinerja pada LKjIP/Laporan Kinerja Rumah Sakit, khususnya dalam menunjukkan kontribusi nyata rumah sakit terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan di tingkat provinsi dan nasional.

A.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Kinerja Serta Alternatif Solusi

a. Keberhasilan Kinerja

Secara akumulatif, RS Paru Manguharjo berhasil mencatatkan kinerja positif pada tahun 2025 dengan rata-rata capaian indikator utama sebesar 104,7%. Peningkatan signifikan terlihat pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mencapai angka 94,72 (Kategori Sangat Baik). Keberhasilan ini dipicu oleh:

1. Optimalisasi Digitalisasi Pelayanan: Keberhasilan implementasi pendaftaran *online* dan sistem antrean terintegrasi yang mengurangi waktu tunggu pasien.
2. Komitmen Mutu dan Keselamatan: Peningkatan capaian elemen akreditasi hingga 99,37% mencerminkan kepatuhan staf terhadap Standard Operating Procedure (SOP).
3. Budaya Kerja ASN: Tingginya Indeks Profesionalitas ASN (85,01) menunjukkan bahwa investasi pada pengembangan kompetensi staf memberikan dampak langsung pada produktivitas kerja

b. Kegagalan Kinerja

Meskipun secara administratif mencapai target, terdapat persoalan struktural yang menghambat pertumbuhan layanan, yaitu:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Kesenjangan SDM Spesialistik: Terjadi kekosongan pada posisi strategis, khususnya Dokter Spesialis Anak dan Dokter Spesialis Bedah. Hal ini menyebabkan rumah sakit tidak dapat melayani kasus-kasus bedah atau rujukan anak secara mandiri.
2. Idle Capacity Alat Kesehatan: Akibat ketiadaan operator spesialis, beberapa sarana prasarana medis canggih yang telah dibeli menjadi tidak terpakai secara optimal (*idle capacity*), yang jika dibiarkan dapat mengakibatkan penyusutan nilai aset tanpa memberikan *return* layanan bagi masyarakat.

c. Alternatif Solusi yang Telah dan Akan Dilakukan:
1. Strategi Rekrutmen Responsif: Melakukan koordinasi intensif dengan BKD dan Dinas Kesehatan Provinsi untuk prioritas formasi PPPK dokter spesialis.
2. Skema Kerja Sama Operasional (KSO): Menjajaki kemitraan dengan rumah sakit rujukan yang lebih besar untuk meminjam tenaga spesialis melalui sistem jadwal visitasi.
3. Teknis Staf: Memberikan pelatihan sertifikasi bagi perawat mahir untuk mengoperasikan alat-alat penunjang agar tetap terawat sambil menunggu tenaga spesialis tersedia.

A.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengelolaan sumber daya keuangan pada tahun 2025 menunjukkan performa yang dinamis. Berdasarkan data anggaran:

- Realisasi Anggaran: Mencapai 106,82% (Rp 17.137.138.784 dari Pagu Rp 16.042.372.978).
- Tingkat Efisiensi: Walaupun realisasi melebihi 100%, hal ini dikategorikan sebagai Efisiensi Produktif. Kelebihan realisasi ini berasal dari optimalisasi pendapatan fungsional BLUD yang dialokasikan kembali untuk pelayanan.

A.7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
   - Peran: Memberikan landasan manajerial melalui tata kelola administrasi keuangan dan kepegawaian.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Dampak: Program ini sangat berhasil menunjang profesionalitas ASN dan akuntabilitas laporan keuangan, yang menjadi syarat mutlak dalam penilaian SAKIP.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat
   - Peran: Operasional langsung layanan medis dan pengadaan logistik kesehatan.
   - *Dampak:* Berhasil dalam pencapaian indikator medis dan akreditasi paripurna. Namun, ditemukan kegagalan parsial dalam pemenuhan target cakupan layanan spesialis (Bedah/Anak) akibat hambatan eksternal (ketersediaan tenaga ahli di pasar tenaga kerja medis).

A.8. Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Kualitatif
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.00	94,72	105,24%	Pasien merasa puas dengan keramahan dan kecepatan prosedur administrasi
Indeks Profesionalitas ASN	83,00	85,01	102,42%	Disiplin pegawai meningkat serta partisipasi dalam diklat teknis melebihi target minimal
Prosentase Indiktaor Program Rumah Sakit	90,00	94,72	103,16%	Standar pelayanan minimal terpenuhi dengan baik di hamper semua unit pelayanan
Presentase elemen akreditasi	92,00	99,37	108,01%	Komitmen tinggi pada standar keselamatan pasien dan dokumentasi rekam medis yang tertib

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. Realisasi Anggaran

Tabel Realisasi Anggaran

NO	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
			Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ProvinsI	13.542.372.978,55	14.687.195.639,00	108.45
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.500.000.000	2.450.556.420	98.02
	Jumlah	**16.042.372.978,55**	**17.137.138.784**	**106.82**

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa pada tahun 2025 terdapat 2 (dua) program antara lain : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Adapun anggaran kedua program tersebut sebesar Rp **16.042.372.978,55** dan terealisasi sebesar Rp **17.137.138.784 (106.82%).**

Tabel Analisis Pelaporan Akuntabilitas Keuangan per Sasaran

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit	Indeks profesionalitas ASN RS Paru Manguharjo Provinsi	13.542.372.978,55	**108.45**
		Persentase indikator program RS Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur		
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Upaya Kesehatan Masyarakat		
2	Meningkatnya Akses Mutu Pelayanan Rumah Sakit dan Keselamatan Pasien	Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standard	**2.500.000.000**	**98.02**

Pada sasaran strategis yang telah ditentukan, yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit dan Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit dan Keselamatan Pasien, terdapat 2 (dua) program yang disusun yaitu: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan alokasi anggaran Rp 13.542.372.978,55 dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan alokasi anggaran Rp. 2.500.000.000. Jumlah seluruh anggaran yang direncanakan pada tahun 2025 adalah Rp 16.042.372.978,55.

Berdasarkan uraian diatas, maka persentase realisasi anggaran per sasaran adalah jumlah alokasi anggaran 2 (dua) program dibagi dengan jumlah seluruh anggaran tahun 2024 adalah sebesar 106.82%

C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Adapun inovasi yang dikembangkan sebagai Upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja meliputi:

NO	JUDUL	UNIT
1	Lanjut Paris (Layanan Antar Jemput Pasien Gratis)	IGD/Rajal
2	Gincu Biru (Gizi Cukup untuk Paisen TB DM dan Penyakit Paru)	Gizi
3	Ingat-Jo (Informasi Layanan dan Pengingat Kontrol Otomatis)	UKM Litbang
4	Bodi Langsing (Boarding Time Pelayanan Sigap di IGD)	IGD
5	Kompilasi (Komunikasi Pelayanan Laboratorium dan Informasi)	Laboratorium
6	Duty Manja (Duty Manajer Instalasi Rawat Jalan)	Rajal
7	E-Linked (Notifikasi Expired Date)	Farmasi
8	KPOP RSPM (Edukasi Pasien Post Operasi)	OK
9	Edu Pari (Edukasi Pasien Baru ICU)	ICU
10	E-Link Control (Elektronik Link Control)	Ranap
11	E-Diary (Elektronik Daily Report of Radiology)	Radiologi
12	SiAPP RSPM (Sistem Antrian Pasien Poliklinik RSPM)	Rawat Jalan
13	Fast Pecut (Fasilitas Permintaan Cuti)	Manajemen/Kepegawaian
14	Dok-Jo (Chat dengan Dokter Gratis 24 Jam)	Komdik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

15	Jo-Smile (Survey Kepuasan Digital)	UKM
16	Bang-Jo (Bincang Sehat Bareng RS Paru Manguharjo)	UKM
17	E-Manajemen	Manajemen
18	Si Keren Sahdu (Sistem Keuangan Perencanaan Penatausahaan Terpadu)	Keuangan
19	Kepatil Memar (Komunikasi dengan Pasien Ventilator Melalui Media Gambar)	ICU
20	Si-Pension (Sistem Pendaftaran Pasien Online)	Loket/RM
21	Si Domba Bali (Homevisit Pasien DO Berobat Kembali)	Komite Medik
22	Alis Ijo (Akses Informasi Laboratorium Bagi Sobat Jo)	Laboratorium
23	Simpel PPID (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan PPID)	UKM/Tim PPID
24	Es-Eco (Edukasi Sebelum Informed Consent)	OK
25	Fast-Jo (Fasilitas Antar Obat Sampai Tujuan bagi Sobat Jo)	Farmasi
26	Bis Patas (Bangun Indikator Sistem Peringatan Air Tandon dengan Alarm Sederhana)	IPSRS/Sanitasi
27	Si Cantik Aktif (Sistem Canggih dan Elektronik Waktu Penggantian Infus)	VIP
28	Wenutrition Center (Weight Management Nutrition Center)	Gizi
29	Bola Api (Barcode Latihan Fisioterapi)	Rehab Medik
30	Monalisa (Monitoring Alat dan Pemeliharaan Sarana Pemeriksaan)	Radiologi
31	Si Ramah	Umum dan kepegawaian
32	Si Imut	Komite Mutu
33	Si Mantap	Keuangan
34	Sata-Jo	UKM
35	Siap Dok	Rawat Jalan

Adapun Penghargaan yang didapatkan oleh Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Penghargaan Fasilitas Kesehatan berkomitmen dalam Pelayanan Kesehatan Program JKN Tingkat Cabang Madiun Tahun 2025 Kategori Rumah Sakit Khusus dari BPJS Kesehatan dari BPJS Kesehatan
2. Penghargaan Fasilitas Kesehatan Berkomitmen Peringkat Ke Tiga dalam Pelayanan Kesehatan Program JKN Tingkat Nasional 2025 Kategori Rumah Sakit Khusus dari BPJS Kesehatan
3. Penghargaan Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2025
4. Penghargaan Atas Komitmennya dalam Melakukan Internalisasi Core Values ASN Berakhlak dengan Predikat Sangat Paham Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Penghargaan Inovasi INGAT-JO (Informasi Layanan dan Pengingat Kontrol Otomatis) Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur Kategori Penyediaan Layanan Kesehatan Tahun 2025
6. Penghargaan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur Tahun 2025
7. Penghargaan Organisasi Perangkat Daerah Sangat Inovatif melalui IGA Awards Provinsi Jawa Timur Tahun 2025

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Direktur berkaitan dengan penyelenggaraan kinerja pada tahun 2025 dan juga sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) sampai dengan perwujudan atau realisasi pelaksanaan pembangunan di lingkungan Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya yang hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Direktur Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Meningkatnya Akuntabiltas Kinerja Rumah Sakit dan Meningkatnya akses mutu pelayanan Rumah Sakit dan Keselamatan Pasien dengan hasil pengukuran kinerja sebagai berikut:

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Meningkatnya Akuntabiltas Kinerja Rumah Sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RS Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur	90	94.72
	Indeks profesionalitas ASN RS Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur	83	85.01

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Persentase indikator program RS Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur	90%	92.85%
Meningkatnya akses mutu pelayanan Rumah Sakit dan Keselamatan Pasien	Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standard	92%	99.37%

Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target sasaran strategis Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur mendapat alokasi anggaran APBD Tahun 2025 sebesar 16.042.372.978,55 dan terealisasi sebesar Rp 17.137.138.784 (106.82%)

2. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan atau kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2025 adalah sebagai berikut :
   a. Sangat sulit dalam pemenuhan SDM utamanya dokter spesialis; Anak,Bedah
   b. Sarana prasarana yang sudah ada belum bisa dimanfaatkan karena operatornya belum ada

Demikian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Instansi Pemerintah Tahun 2025 Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. Tanggapan Atasan Langsung

☐	LAPORAN KURANG BAIK
☐	LAPORAN SUDAH BAIK
☐	LAPORAN DIPERBAIKI
☐	REALISASI DITELITI ULANG
☐	CAPAIAN DITELITI ULANG
☐	LAIN-LAIN

.....

.....

.....

.....

.....

Madiun,22 Januari 2026

Direktur Rumah Sakit Paru Manguharjo
Provinsi Jawa Timur

dr. Hendri Harianto M.Kes.
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 197012092007011012

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).